

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Seperti yang tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa :”Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”. Begitu juga dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu UUD 1945, khususnya Pasal 28 C Ayat (1) juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal (2000) mereviu bahwa pendidikan untuk semua harus mempertimbangkan kebutuhan mereka yang miskin dan tidak beruntung, termasuk yang berkebutuhan khusus (UNESCO 2000). Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada batasan terhadap seseorang untuk mendapatkan pendidikan, apapun keadaan setiap individu tersebut, tidak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus.

Salah satu pendidikan yang mencerminkan pendidikan untuk semua adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia. Munculnya pendidikan inklusif ini ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. adanya pendidikan integrasi terutama bagi tunanetra yang mulai di praktekkan di berbagai negara pada tahun 1960-an. Pada tahun 1980-an mulai diperkenalkan dengan istilah inclusive education, diperkenalkan dan dipraktekkan di Kanada dan

Elda Despalantri, 2014

*Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri Kota Payakumbuh Berdasarkan Indeks Inklusif*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkembang ke AS serta ke negara-negara lainnya. Awal pelaksanaan pendidikan inklusif dalam dunia internasional tertuang dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Dunia internasional kemudian mengadakan konferensi yang membahas pendidikan kebutuhan khusus. Konferensi tersebut pertama kali diadakan Salamanca tahun 1994. Pada konferensi itu, pendidikan inklusif ditetapkan sebagai prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar kelompok-kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terkucilkan.

Pendidikan inklusif dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Ada beberapa definisi tentang pendidikan inklusif, salah satunya yang dirumuskan dalam Seminar Agra tahun 1998 yaitu pendidikan inklusif lebih luas daripada pendidikan formal : mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal, mengakui bahwa semua anak dapat belajar, mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak : usia, gender, etnik, bahasa, dan lain-lain.

Jadi, pada intinya pendidikan inklusif ini, kita tidak mengenal ras, suku, agama, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Semua anak belajar bersama baik itu pada pendidikan formal, maupun non formal. Oleh sebab itu hendaknya di tiap-tiap sekolah yang ada di daerah kabupaten atau di kota sudah melaksanakan pendidikan inklusif. Hal ini tercantum pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 4 yang berbunyi :

1. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1(satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
2. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Selain itu, pada UU No 20 tahun 2003 pasal 5 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

**Elda Despalantri, 2014**

***Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri Kota Payakumbuh Berdasarkan Indeks Inklusif***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan.layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Oleh sebab itu, melalui pendidikan inklusif diharapkan sekolah regular dapat melayani semua peserta didiknya dengan semaksimal mungkin tanpa terkecuali, termasuk dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Hendaknya di masing-masing daerah baik itu kota maupun kabupaten sudah memiliki sekolah inklusif.

Salah satu kota yang telah mendeklarasikan sebagai kota inklusif adalah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili Dr. Rizal, M.Pd, mendeklarasikan Payakumbuh sebagai sebagai Kota Inklusif. Temu deklarasi ditandai dengan suatu Komitmen Gerakan Pendidikan Inklusif Kota Payakumbuh Tahun 2012, tepatnya tanggal 29 Juni 2012 bertempat di gedung serbaguna SMKN 2 Payakumbuh. Sehingga Walikota dan Kepala Pusat Sumber SLB N Center Kota Payakumbuh mendapat penghargaan Inclusive Education Award.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu penggerak inklusif di kota Payakumbuh (Ibu Dewi Marzah), salah satu alasan kenapa kota Payakumbuh menjadi kota inklusif adalah faktor budaya dan keberadaan resource center di kota Payakumbuh. Budaya minangkabau dari dulu sudah mencerminkan budaya inklusif, terbukti dengan adanya falsafah minangkabau seperti berikut : ‘nan buto pambuih lasuang, nan pakak palapeh badiah, nan lumpuah pauni rumah, nan cadiak tampek batanyo’. Makna dari falsafah di atas adalah semua orang apapun keadaannya tetap bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Tak satupun manusia diciptakan Allah SWT itu sia-sia. Di samping itu juga dengan adanya SLB Resource Center, serta kerja sama dengan negara asing dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, maka terwujudlah Payakumbuh menjadi Kota Inklusif.

Meskipun kota Payakumbuh sudah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusif, akan tetapi masih banyak pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal. Jumlah sekolah yang ada di kota Payakumbuh tercatat hingga tahun 2013 ini yaitu, tingkat SD atau MI negeri / swasta 75 sekolah, SMP dan MTs Negeri dan Swasta ada 20, tingkat SMA negeri/ swasta ada 11 sekolah, tingkat MA negeri/ swasta ada 5 sekolah, sedangkan tingkat SMK negeri/ swasta ada 12 sekolah. Walaupun demikian, sampai saat ini kota Payakumbuh tetap dalam proses pengembangan pendidikan inklusif untuk ke arah yang lebih baik.

Berbicara soal Pendidikan inklusif, maka kita tidak terlepas dari implementasinya. Implementasi pendidikan Inklusif dipengaruhi berbagai faktor, misalnya sikap dan pengetahuan tenaga pendidik atau masyarakat terhadap pendidikan inklusi, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas lainnya. Pada dasarnya, implementasi atau pelaksanaan pendidikan inklusif itu tidak mudah, kita harus mempersiapkan segala hal. Apalagi ketika sebuah kota menjadi kota inklusi, baik itu sekolah, tempat-tempat umum, serta masyarakatnya pun juga harus inklusif. Untuk itu penulis sangat tertarik meneliti dan ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Payakumbuh berdasarkan indeks inklusi, karena kota tersebut sudah menjadi kota inklusif.

## **B. FOKUS PENELITIAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh telah diimplementasikan. Namun hingga saat ini belum ada penelitian tentang sejauh mana pelaksanaan pendidikan inklusif di kota payakumbuh tingkat sekolah dasar. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini, pelaksanaan inklusi tersebut diamati menggunakan indeks inklusi yang dikeluarkan oleh Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). Menurut Ainscow (2002) pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dievaluasi menggunakan suatu indeks. Indeks inklusif ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (creating inclusive cultures), (2)

dimensi Kebijakan (producing inclusive policies), dan (3) dimensi Praktik (evolving inclusive practices).

Oleh karena itu yang menjadi fokus penelitian ini adalah : **“Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Payakumbuh”**. Adapun rincian pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya inklusif di SMP negeri kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana kebijakan inklusif di SMP negeri kota Payakumbuh ?
3. Bagaimana praktik inklusif di SMP negeri kota Payakumbuh ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP negeri kota Payakumbuh, yang terbagi ke dalam tiga aspek yaitu :

1. Mengetahui budaya inklusif di SMP Negeri kota Payakumbuh
2. Mengetahui kebijakan inklusif di SMP Negeri kota Payakumbuh.
3. Mengetahui praktik inklusif di SMP Negeri kota Payakumbuh.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini hendaknya bermanfaat dalam dunia pendidikan, tidak hanya bagi penulis atau guru, tetapi juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi sekolah

Hendaknya penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dan gambaran untuk melaksanakan pendidikan inklusif ke arah yang lebih baik, terutama bagi sekolah yang sudah inklusif dan sebagai contoh bagi sekolah yang belum melaksanakan pendidikan inklusif.

## 2. Bagi dinas pendidikan setempat

Sebagai catatan dan gambaran bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Payakumbuh khususnya tingkat SMP negeri.

## 3. Bagi pemerintah kota dan provinsi

Sebagai pedoman dan masukan terutama di bidang pendidikan inklusif, baik itu di sekolah, di rumah atau di tempat-tempat umum lainnya khususnya kota Payakumbuh yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga kota Payakumbuh ke depannya dapat dijadikan sebagai contoh kota yang melaksanakan pendidikan inklusif, baik itu di Indonesia maupun mancanegara.